BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, hingga saat ini, UKM masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya, terutama dalam hal akses terhadap layanan keuangan dari lembaga formal seperti bank dan koperasi. UKM memiliki peran penting dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, karena sebagian besar tenaga kerja di Indonesia terserap di sektor ini. UKM juga membantu pemerataan pembangunan antar daerah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dengan peningkatan akses terhadap layanan keuangan, pelatihan, dan teknologi, UKM dapat tumbuh lebih produktif, inovatif, dan berkelanjutan, sehingga mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Akses layanan keuangan merupakan kemampuan pelaku UKM untuk memperoleh dan memanfaatkan berbagai produk keuangan secara efektif, mulai dari tabungan, kredit, hingga layanan digital. Akses layanan keuangan adalah kemampuan individu atau pelaku usaha dalam memperoleh dan memanfaatkan produk layanan keuangan formal seperti kredit, tabungan, asuransi, dan sistem pembayaran, (Bank Indonesia, 2021). Akses keuangan merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan

mendorong pengembangan usaha kecil. UKM yang memiliki akses luas ke lembaga keuangan lebih mudah memperoleh modal untuk memperluas usaha dan meningkatkan produktivitas, (World Bank, 2020).

Akses keuangan merupakan kondisi di mana masyarakat atau pelaku usaha dapat menjangkau produk keuangan dengan biaya yang terjangkau, prosedur yang mudah, dan perlindungan yang memadai, Otoritas Jasa Keuangan. Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), akses layanan keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha karena memungkinkan mereka memperoleh modal kerja, investasi, serta fasilitas transaksi yang lebih efisien dan aman. Hanya sebagian kecil pelaku UKM yang dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan pendanaan dan kemampuan lembaga keuangan dalam menyalurkan dana kepada sektor UKM (OJK, 2020) Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya akses layanan keuangan UKM adalah lingkungan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Regulasi dan prosedur administratif yang rumit sering kali menyulitkan pelaku usaha kecil dalam memperoleh pinjaman (Dipa Teruna, 2024). Selain itu, perubahan kebijakan yang tidak konsisten juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menjalankan usaha.

Lingkungan regulasi adalah kumpulan lengkap dari semua aturan, undang-undang, kebijakan, dan pedoman yang dibuat dan ditegakkan oleh pemerintah atau badan pengatur, yang mengatur bagaimana individu, organisasi, dan bisnis harus bertindak dan beroperasi. Tujuan utamanya yaitu, melindungi masyarakat, konsumen, pekerja, dan lingkungan dari bahaya atau praktik tidak etis. Dan juga

Memastikan pasar berjalan adil, mencegah monopoli, dan menjaga stabilitas ekonomi dan Memandu aktivitas menuju tujuan tertentu (misalnya, mengurangi polusi, meningkatkan kesehatan).

Lingkungan regulasi merupakan seperangkat aturan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), (Ningsi, 2023). Regulasi yang kondusif dapat menciptakan iklim usaha yang stabil, transparan, dan adil, sehingga mempermudah UKM dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Regulasi yang rumit, biaya administrasi tinggi, dan proses perizinan yang panjang menjadi hambatan utama bagi UKM dalam mengakses layanan keuangan. Oleh karena itu, regulasi yang sederhana, transparan, dan mendukung sektor UKM sangat berpengaruh terhadap meningkatnya akses ke layanan keuangan, (Pratiwi, 2020).

Lingkungan regulasi yang baik juga mencakup keberadaan sistem hukum yang menjamin keamanan kontrak, perlindungan hak kepemilikan, dan kepastian dalam penegakan hukum. (Bank Indonesia ,2020) menegaskan bahwa keterbukaan informasi, kemudahan perizinan, dan transparansi lembaga keuangan merupakan aspek penting dalam memperkuat kepercayaan UKM terhadap sistem keuangan. Dengan demikian, regulasi yang stabil dan berpihak pada UKM dapat meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam sektor formal dan memperluas jangkauan layanan keuangan. Dalam konteks pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), lingkungan regulasi memiliki peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan. Regulasi yang jelas,

sederhana, dan berpihak pada pelaku usaha kecil dapat mendorong pertumbuhan UKM secara signifikan. Sebaliknya, regulasi yang rumit, tumpang tindih, atau sering berubah justru menjadi hambatan bagi UKM dalam menjalankan usahanya secara efisien.

Ketersediaan Jaminan merupakan aset yang dijadikan sebagai bentuk penanggungan risiko bagi lembaga keuangan apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayarannya. Menurut Bank Indonesia (2015), jaminan berfungsi sebagai alat pengaman bagi pihak pemberi pinjaman dalam mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat kredit macet. Oleh karena itu, lembaga keuangan pada umumnya mensyaratkan adanya aset berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, maupun aset tidak berwujud seperti surat berharga dan piutang usaha sebagai bentuk jaminan. Ketersediaan jaminan yang memadai akan meningkatkan peluang UKM untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Sebaliknya, keterbatasan aset yang dapat dijaminkan seringkali menjadi hambatan utama bagi pelaku UKM dalam memperoleh pinjaman, karena lembaga keuangan menilai adanya risiko tinggi terhadap kemampuan pengembalian dana. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ningsi, 2023) yang menyatakan bahwa banyak UKM di Indonesia mengalami kesulitan memperoleh kredit bank akibat tidak memiliki agunan yang cukup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan jaminan memiliki peran strategis dalam menentukan sejauh mana UKM dapat mengakses layanan keuangan secara optimal.

Jaminan *(collateral)* merupakan aset yang diserahkan debitur kepada kreditur untuk menjamin pinjaman yang diterima. Lembaga keuangan

memerlukan jaminan sebagai bentuk pengamanan terhadap risiko gagal bayar, (Kuncoro, 2020). Banyak UKM yang kesulitan mengakses kredit karena tidak memiliki aset tetap yang dapat dijadikan agunan (Prabowo, 2021). Oleh sebab itu, semakin baik kemampuan UKM dalam menyediakan jaminan, semakin besar peluang mereka mendapatkan pembiayaan. Sebagian besar UKM tidak memiliki aset tetap yang dapat dijadikan jaminan kredit, sehingga lembaga keuangan enggan memberikan pembiayaan. Permasalahan ini sering kali mengakibatkan pelaku UKM beralih ke sumber pendanaan informal dengan bunga tinggi. (Open AI,2024) Selain Lingkungan regulasi dan Ketersediaan jaminan, tingkat suku bunga juga berperan penting dalam menentukan minat UKM untuk mengakses pembiayaan. Suku bunga yang tinggi akan menambah beban biaya pinjaman dan menurunkan kemampuan bayar pelaku UKM. Sebaliknya, jika suku bunga lebih rendah dan stabil, maka UKM akan lebih tertarik menggunakan layanan keuangan formal.

Tingkat suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam (debitur) kepada pemberi pinjaman (kreditur) atas penggunaan dana dalam periode tertentu. Suku bunga yang tinggi berarti biaya pinjaman menjadi mahal, sehingga memengaruhi keputusan usaha dalam mengakses kredit. Tingginya Tingkat suku bunga adalah persentase imbalan atau biaya yang dikenakan atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu, baik oleh pihak pemberi pinjaman (bank) maupun penerima pinjaman (debitur). suku bunga adalah harga yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dana dalam jangka waktu tertentu. Suku bunga menjadi faktor penting dalam keputusan

meminjam karena mempengaruhi besar kecilnya biaya pinjaman. Fungsinya yaitu untuk mengendalikan inflasi, menarik investasi asing, menjaga stabilitas nilai tukar, meningkatkan tabungan masyarakat, dan membatasi jumlah kredit yang beredar agar perekonomian tetap stabil.

Suku bunga tinggi menyebabkan UKM kesulitan mengakses pembiayaan formal karena meningkatnya biaya pinjaman dan risiko gagal bayar(Demirguc-Kunt & Maksimovic, 2008). Suku bunga yang tinggi membuat UKM enggan mengajukan pinjaman karena meningkatnya beban bunga. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, maka minat UKM untuk meminjam akan meningkat (Dewi & Pratama 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh lingkungan regulasi, ketersediaan jaminan, dan tingginya tingkat suku bunga terhadap akses layanan keuangan UKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemudahan UKM dalam mengakses layanan keuangan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan inklusi keuangan di sektor UKM. Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang, “pengaruh lingkunagn regulasi, ketersediaan jaminan, dan tingginya tingkat suku bunga terhadap akses layanan keuangan ukm di kota batu”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pembahasan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Apakah lingkungan regulasi berpengaruh terhadap akses layanan keuangan UKM?
2. Apakah ketersediaan jaminan berpengaruh terhadap akses layanan keuangan UKM?
3. Apakah tingginya tingkat suku bunga berpengaruh terhadap akses layanan keuangan UKM?
4. Apakah lingkungan regulasi, ketersediaan jaminan, dan tingginya tingkat suku bunga secara simultan berpengaruh terhadap akses layanan keuangan UKM?

1.3.Tujuan Penelitian

Jika di lihat dari rumusan masalah di atas, maka untuk menganalisis pengaruh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan regulasi terhadap akses layanan keuangan UKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh ketersediaan jaminan terhadap akses layanan keuangan UKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingginya tingkat suku bunga terhadap akses layanan keuangan UKM.

4. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan regulasi, ketersediaan jaminan, dan tingginya tingkat suku bunga secara simultan terhadap akses layanan keuangan UKM.

1.4. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme (kuantitatif). paradigma positivisme bisa memberikan gambaran yang akurat dan terukur. Penggunaan paradigma positivisme pada penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini berfokus pada UKM di Kota Batu.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan pustaka untuk perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal dan gaya hidup terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat ataupun mahasiswa lainnya untuk dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang membahas topik yang sama.
3. Manfaat akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penerapan ilmu yang dicapai dari kuliah hingga dapat menambah wawasan.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Pada dasarnya ruang lingkup pada riset ini ialah untuk memberikan sebuah pembahasan yang mana akan berfokus pada sebuah tujuan sehingga perlu dibuat sebuah ruang lingkup ialah berfokus pada Pengaruh lingkungan

regulasi, ketersediaan jaminan, tingginya tingkat suku bunga terhadap akses layanan keuangan UKM dikota batu.